

Peran Kepemimpinan Pemerintah Kota Baubau dalam Pengembangan Infrastruktur

Suhada¹, Junaid Gazalin², Rajlun Fahrian³, Gilang Syaputra⁴, La yunus⁵

Universitas Muhammdiyah Buton

E-mail : meyyssyuhada@gmail.com¹, junaidgazalin@gmail.com², rajlunaan@gmail.com³,
gilangsyaputra2012@gmail.com⁴, layunus.aup@gmail.com⁵

Article History:

Received: 26 Januari 2025

Revised: 06 Maret 2025

Accepted: 14 Maret 2025

Keywords: *Kepemimpinan, Infrastruktur, Kota Baubau, Pemerintah, Pembangunan.*

Abstract: *Kepemimpinan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur, terutama di kota-kota yang sedang berkembang seperti Baubau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kota Baubau dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur serta tantangan yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah Kota Baubau berperan strategis dalam pengembangan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta layanan publik lainnya. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, birokrasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Pemerintah Kota Baubau diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, memperkuat perencanaan jangka panjang, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.*

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan komponen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota Baubau, sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus berkembang, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing kota dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah (Alwi dkk., 2023).

Dalam konteks pembangunan daerah, kepemimpinan pemerintah kota memegang peranan yang sangat strategis. Pemimpin pemerintahan tidak hanya bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Baubau memiliki kewajiban untuk merumuskan rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal. Dengan perencanaan

yang baik dan kebijakan yang tepat, pemerintah kota dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Setiawati & Farhani, 2019).

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Infrastruktur yang memadai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Bagi Kota Baubau, yang merupakan pintu gerbang perdagangan dan transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi regional (Satre, 2024).

Kota Baubau menghadapi berbagai tantangan khas perkotaan, seperti peningkatan jumlah penduduk, kemacetan, dan kebutuhan akan layanan dasar yang semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan ini, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak, mencakup pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, dan layanan publik lainnya. Namun, upaya tersebut tidak terlepas dari peran strategis kepemimpinan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Dodiyanto Paulus & Wahyu Subadi, 2024).

Namun, dalam proses pengembangan infrastruktur, pemerintah Kota Baubau menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, regulasi birokrasi yang kompleks, dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Keterbatasan anggaran sering kali memaksa pemerintah untuk membuat prioritas dalam pembangunan, sementara birokrasi yang panjang bisa memperlambat implementasi proyek. Di sisi lain, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur juga dapat menghambat keberlanjutan dari proyek yang telah dilaksanakan (Wijaya, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan infrastruktur, serta mengidentifikasi strategi-strategi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran strategis pemerintah dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Baubau, sehingga dapat menjadi rujukan bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran kepemimpinan pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan infrastruktur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam aspek-aspek sosial, kebijakan, dan kepemimpinan yang berperan dalam pembangunan infrastruktur di Baubau. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pemerintah kota mengelola, merencanakan, dan mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis. Data Primer: Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pejabat pemerintah Kota Baubau, terutama yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan perwakilan masyarakat. Data Sekunder: Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah Kota Baubau, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan proyek infrastruktur, dan data statistik daerah (Nabilah dkk., 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, wawancara, observasi,

dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang melibatkan tahap-tahap seperti Reduksi data, kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Daud, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pemerintah Kota Baubau memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur kota, terutama dalam bidang perencanaan, implementasi, pengawasan, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Peran Pemerintah Kota Baubau dalam Perencanaan Infrastruktur

Pemerintah Kota Baubau menunjukkan kepemimpinan yang aktif dalam merancang perencanaan infrastruktur, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan jangka menengah serta panjang. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur di sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terstruktur menjadi fondasi dalam mendorong kelancaran pelaksanaan proyek dan pemanfaatan anggaran secara efisien. Pembahasan, meskipun perencanaan sudah berjalan baik, masih ada tantangan dalam hal koordinasi antardinas, yang kadang menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan terukur. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sinergi antarinstansi untuk meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam pengalokasian sumber daya (Rolos dkk., 2018).

Perencanaan infrastruktur adalah langkah strategis yang sangat penting dalam pengembangan suatu daerah. Pemerintah Kota Baubau telah menunjukkan kepemimpinan yang proaktif dalam merancang perencanaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen utama yang digunakan untuk menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan manusia. (Bill, Lumi, t.t.)

Kesimpulannya, Pemerintah Kota Baubau telah menunjukkan kepemimpinan proaktif dalam merancang perencanaan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang melalui RPJMD. Meskipun perencanaan terstruktur telah mendukung efisiensi anggaran dan kelancaran proyek, tantangan koordinasi antardinas tetap menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan sinergi dan mengurangi keterlambatan serta kesalahan dalam pengalokasian sumber daya.

2. Implementasi dan Pengawasan Proyek Infrastruktur

Pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Baubau telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pemerintah kota, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bertanggung jawab dalam mengelola proyek dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa proyek infrastruktur utama, seperti pembangunan jalan dan jembatan, dapat diselesaikan dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dan birokrasi. Pembahasan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terbukti efektif dalam beberapa proyek besar, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal akuntabilitas dan transparansi pada proyek-proyek skala kecil. Hambatan birokrasi yang mempersulit proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi kendala dalam mempercepat

pelaksanaan proyek. Reformasi birokrasi dan sistem pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengoptimalkan waktu dan biaya proyek (Akib & Tepare, 2017).

Efisiensi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sangat bergantung pada sistem manajemen proyek yang baik, sinergi antardinas, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pelaporan. Penekanan pada penyusunan rencana detail proyek yang realistis dan disertai target capaian yang terukur menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan hasil. Hal ini sesuai dengan temuan yang menyatakan bahwa perencanaan yang matang dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan pengeluaran di luar anggaran (Wilwin Wilwin, 2021).

Secara Keseluruhan, Pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Baubau telah menunjukkan hasil yang positif pada beberapa proyek utama seperti jalan dan jembatan, meskipun masih menghadapi hambatan teknis dan birokrasi. Pengawasan pemerintah terbukti efektif pada proyek besar, tetapi peningkatan akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk proyek skala kecil. Efisiensi pelaksanaan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, manajemen proyek yang baik, sinergi antardinas, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, yang semuanya bertujuan mengurangi keterlambatan dan pembengkakan anggaran. Reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa guna mengoptimalkan waktu dan biaya.

3 .Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Pemerintah Kota Baubau juga telah menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan infrastruktur. Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti dalam bentuk kemitraan publik-swasta (PPP), digunakan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sementara partisipasi masyarakat diharapkan dalam hal perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun. Hasil wawancara dengan pejabat pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap investasi dari sektor swasta dalam proyek-proyek strategis. Pembahasan, Kolaborasi ini membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan anggaran dan meningkatkan efisiensi. Namun, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga infrastruktur. Peningkatan komunikasi dan penyuluhan masyarakat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya infrastruktur bagi kesejahteraan bersama (Wiridin dkk., 2022)

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan pendekatan berbasis komunikasi publik dan edukasi yang melibatkan komunitas secara langsung. Program penyuluhan dan kampanye kesadaran dapat membantu masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga infrastruktur. Selain itu, pemerintah dapat membangun sistem penghargaan bagi komunitas yang berperan aktif dalam pemeliharaan fasilitas umum (Sari dkk., 2024)

Kesimpulannya, Kolaborasi Pemerintah Kota Baubau dengan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (PPP) telah membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efisiensi pengembangan infrastruktur. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dalam perawatan dan pemeliharaan infrastruktur, namun masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan berbasis komunikasi publik dan edukasi yang melibatkan komunitas secara langsung, termasuk program penyuluhan dan kampanye kesadaran. Selain itu, sistem penghargaan bagi komunitas yang aktif dalam pemeliharaan fasilitas umum dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur bagi kesejahteraan bersama.

4. Tantangan Utama: Keterbatasan Anggaran dan Birokrasi

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran dan kompleksitas birokrasi

adalah tantangan utama yang menghambat pengembangan infrastruktur di Kota Baubau. Anggaran pembangunan yang terbatas memaksa pemerintah kota untuk mengutamakan proyek-proyek yang mendesak, sehingga beberapa proyek lain tertunda. Selain itu, proses birokrasi yang panjang memperlambat pelaksanaan proyek, khususnya dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Pembahasan, Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan investasi dan optimalisasi sektor-sektor produktif lainnya. Reformasi birokrasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat proses administrasi, seperti dengan menerapkan teknologi informasi dan sistem manajemen proyek yang lebih efisien (Hidayah dkk., 2021).

Kompleksitas birokrasi dapat disederhanakan melalui reformasi administrasi dan digitalisasi. Implementasi sistem e-governance, seperti e-procurement dan e-permit, dapat mempercepat proses pengadaan dan perizinan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam manajemen proyek dan pengelolaan teknologi juga diperlukan agar sistem baru dapat diimplementasikan secara optimal (Siti Khaeromah, 2021).

Kesimpulannya, keterbatasan anggaran dan kompleksitas birokrasi merupakan tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur di Kota Baubau. Upaya untuk mengatasinya meliputi peningkatan pendapatan asli daerah melalui investasi dan optimalisasi sektor produktif, serta reformasi birokrasi dengan digitalisasi seperti e-governance untuk mempercepat proses administrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penerapan sistem baru dan mempercepat pelaksanaan proyek.

5.Strategi Peningkatan Peran Kepemimpinan Pemerintah

Berdasarkan temuan di atas, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Baubau untuk meningkatkan peran kepemimpinan dalam pengembangan infrastruktur antara lain:

- a. Penguatan Sinergi Antardinas, membentuk tim koordinasi lintas dinas untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Peningkatan Akuntabilitas, memperkuat sistem pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemantau independen.
- c. Optimalisasi Kerja Sama Swasta dan Edukasi Masyarakat, mengadakan sosialisasi intensif tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur serta memperluas peluang investasi bagi sektor swasta.
- d. pat meningkatkan peran kepemimpinan dalam pengembangan

Secara Keseluruhan, Pemerintah Kota Baubau dapat meningkatkan peran kepemimpinan dalam pengembangan infrastruktur melalui penguatan sinergi antardinas dengan membentuk tim koordinasi lintas dinas, meningkatkan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat sebagai pemantau independen, serta mengoptimalkan kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pemeliharaan infrastruktur perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

6.Dimensi Sosial: Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di Kota Baubau memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan akses ke layanan kesehatan atau pendidikan kini dapat

menikmatinya dengan lebih mudah. Pembahasan, dampak sosial ini belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang akses infrastrukturnya masih minim. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam merencanakan proyek infrastruktur. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan untuk memastikan kebutuhan mereka benar-benar diakomodasi (Haning, 2018).

Meskipun dampak sosial pembangunan infrastruktur terlihat positif, ketimpangan dalam distribusi manfaat masih menjadi masalah. Wilayah terpencil dengan akses infrastruktur minim seringkali tertinggal, sehingga masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari pembangunan. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah marginal. (Sri Mulatsih, 2019)

Secara Keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Kota Baubau telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mempermudah akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, distribusi manfaatnya masih belum merata, khususnya di wilayah terpencil yang infrastruktur dasarnya masih minim. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan guna memastikan kebutuhan mereka terpenuhi secara optimal.

7. Dimensi Ekonomi: Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Lokal

Pembangunan infrastruktur telah membuka peluang ekonomi baru di Kota Baubau, seperti pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan dan pelabuhan, mempermudah distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Pembahasan, Meskipun infrastruktur telah memberikan manfaat ekonomi, potensi optimalnya belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan investasi. Selain itu, proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah sering kali tidak disertai dengan pengembangan program pelatihan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta perlu diprioritaskan untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur (Dian Feradiah & Agus Prianto, 2024).

Pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, terutama di daerah yang memiliki potensi besar seperti Kota Baubau. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya, membuka akses yang lebih luas untuk distribusi barang dan jasa. Hal ini mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan produktivitas lokal. (Rindang Bangun Prasetyo, 2009)

Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur di Kota Baubau telah memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Akses transportasi yang lebih baik mempermudah distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Namun, potensi optimal dari infrastruktur belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan investasi dan kurangnya program pemberdayaan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi pembangunan ekonomi lokal.

8. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur di Kota Baubau telah memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna lahan dan peningkatan

limbah konstruksi. Misalnya, pembangunan jalan baru di beberapa wilayah sering kali mengorbankan area hijau yang penting bagi ekosistem lokal. Hal ini dapat memicu masalah jangka panjang seperti banjir atau degradasi lingkungan. Pembahasan, Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan infrastruktur sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan. Pemerintah perlu melakukan kajian lingkungan secara menyeluruh sebelum memulai proyek serta memastikan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem juga menjadi langkah yang diperlukan.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun kajian lingkungan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif proyek sejak awal. Kajian ini mencakup analisis tata guna lahan, dampak terhadap ekosistem lokal, serta potensi limbah yang dihasilkan selama konstruksi. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti material konstruksi daur ulang, energi terbarukan dalam proses pembangunan, dan sistem pengelolaan limbah yang efisien.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem juga sangat penting. Melalui edukasi yang terstruktur, masyarakat dapat memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan sekitar serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan solusi inovatif yang mendukung keberlanjutan, seperti insentif untuk penggunaan teknologi hijau dan kebijakan ramah lingkungan.

Pembangunan yang inklusif juga perlu diterapkan untuk memastikan manfaat yang merata tanpa merugikan kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Infrastruktur berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. (Evy Sriwati, 2024)

Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur di Kota Baubau membawa manfaat besar namun menimbulkan dampak lingkungan yang perlu diatasi. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kajian lingkungan menyeluruh, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem. Dengan langkah-langkah ini, pembangunan dapat berlangsung inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

9. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antara pemerintah Kota Baubau dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor internasional masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Saat ini, skema kemitraan publik-swasta (PPP) telah mulai diterapkan pada beberapa proyek, tetapi belum merata di semua sektor. Misalnya, sektor kesehatan dan pendidikan masih didominasi oleh pendanaan pemerintah, sementara kontribusi swasta relatif rendah. Pembahasan, Kolaborasi yang lebih kuat dapat dicapai dengan memberikan insentif kepada sektor swasta, seperti kemudahan perizinan atau pengurangan pajak bagi investor yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur publik. Selain itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan hasil proyek, sehingga menarik lebih banyak mitra strategis (Rahmawati & Hidayah, 2020).

Untuk meningkatkan kolaborasi ini, langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif kepada sektor swasta, seperti kemudahan proses perizinan, keringanan pajak, dan skema pembiayaan bersama yang menarik. Insentif ini akan mendorong lebih banyak partisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, pemerintah perlu membangun

kepercayaan publik dan mitra strategis dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek. Mekanisme pelaporan yang akuntabel dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan akan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak.

Kerja sama dengan lembaga donor internasional juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek strategis, terutama yang memerlukan teknologi tinggi atau pembiayaan besar. Lembaga donor biasanya menawarkan bantuan teknis dan pendanaan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek. Di sisi lain, kolaborasi dengan OMS penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan lingkungan sosial atau ekologi.

Kolaborasi yang efektif akan menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mengoptimalkan dampak positifnya bagi masyarakat. Untuk itu, pendekatan berbasis inklusi, transparansi, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam menjalin kemitraan yang lebih luas dan produktif. (Sami'an, 2024)

Secara Keseluruhan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah Kota Baubau dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor internasional sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberikan insentif kepada sektor swasta, memastikan transparansi pengelolaan proyek, dan memanfaatkan bantuan lembaga donor, sinergi yang lebih kuat dapat tercapai. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pendanaan dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

10.Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi Pembangunan

Hambatan birokrasi, seperti proses perizinan yang berbelit-belit dan lambatnya pengambilan keputusan, sering kali menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pengadaan lahan untuk proyek jalan raya membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan karena kendala administratif dan konflik kepemilikan lahan. Pembahasan, Reformasi birokrasi menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah Kota Baubau dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi, seperti sistem e-government dan platform manajemen proyek yang transparan. Selain itu, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) tentang manajemen proyek dan kepemimpinan juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih cepat dan berkualitas (Achmad, 2022).

Kesimpulannya, hambatan birokrasi, seperti proses perizinan yang kompleks dan lambatnya pengambilan keputusan, dapat diatasi melalui reformasi birokrasi yang fokus pada digitalisasi administrasi, seperti e-government, serta peningkatan kapasitas ASN dalam manajemen proyek dan kepemimpinan. Langkah ini akan mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara efisien dan berkualitas.

KESIMPULAN

Kepemimpinan pemerintah Kota Baubau memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan infrastruktur, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Dengan strategi yang tepat dan pembenahan di berbagai sektor, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Baubau dan membawa dampak positif bagi

kesejahteraan masyarakat. kepemimpinan pemerintah Kota Baubau dalam pengembangan infrastruktur tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses, keterbatasan anggaran, dan dampak lingkungan harus segera diatasi melalui kebijakan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kota Baubau dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). *Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir..*
- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017).
- Alwi, L. O. A., Marsuki Iswandi, Bahari, Irfan Ido, & Yursalam. (2023). (Studi Implementasi Hasil Musrenbang di Kecamatan Batupoaro Kota Baubau). *Journal Publicuho, Bill,Lumi.* (t.t.). *Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan*
- Daud, Y. (2017). *Peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik (studio di dusun aholeang desa mekatta kecamatan malunda kabupaenmajene).* *Jurnal Ilmu Pemerintahan,*
- Dian Feradiah & Agus Prianto. (2024). Penguatan peran pemerintahan melalui collaborative governance dalam menyediakan lapangan kerja inklusif di kabupaten pasuruan . *Journal Publicuho,.*
- Dodiyanto Paulus & Wahyu Subadi. (2024). *Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gedung pertemuan umum di desa ampari bura kecamatan patangkep tutul kabupaten barito timur .*
- Evy Sriwati, B. S. (2024, Februari). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur.*
- Haning, M. T. (2018). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. 4*
- Hidayah, E. S., Almadani, M., & Suhriawan, A. M. (2021). Tantangan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju “Low Cost Training (LCT)” Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur),*
- Nabilah, W. O. P., Mappasomba, M., & Salahuddin, S. (2024). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Kapasitas Petani Padi Sawah Di Kelurahan Ngkaring-Ngkaring Kecamatan Bungi Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat,*
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*
- Rindang Bangun Prasetyo, M. F. (2009, n Mei). *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Iindonesia.*
- Rolos, J. C., Sambiran, S., & Singkoh, F. (2018). *Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Didesa Winebetan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa.*
- Sami'an. (2024, Agustus). *Peran Hukum Admisitrasi Dalam Pengaturan Kemitraan Publik-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur.*
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2024). *Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. 10, 119.*
- Satre, N. D. (2024). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Didesa Ampari Bura Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur.*
- Setiawati, B., & Farhani, A. (2019). *Analisi Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani Didesa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten*

Barito Timur.

Siti Khaeromah, F. Y. (2021). *Digitalisasi Binrokrasi Melalui Pembangunan Smart ASN Di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.*

Sri Mulatsih. (2019, Juli). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara.*

Wijaya, A. A. M. (2021). *Peran Komunitas Baubau Creative Forum (BBCF) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Baubau.*

Wilwin Wilwin, A. S. (2021, Februari). *Studi Identifikasi Risiko Pada Proyek Infrastruktur Di Indonesia.*

Wiridin, D., Gelong, H. R., Salam, S., Malaha, N., & Ruliah, R. (2022). Polima dalam perspektif hukumpemerintahan daerah . *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio,*